

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fraud adalah merupakan tindakan kecurangan yang dimana berarti adanya ketidakjujuran atau suatu bentuk penipuan yang dilakukan secara sengaja atau dapat juga merupakan kesalahan dalam penyajian yang dilakukan secara sadar pada fakta yang bersifat material. Penelitian yang saat ini dilakukan memiliki tujuan untuk dapat mengetahui pengaruh dari pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* dalam pencegahan *fraud*. Jones & Bates (1990) mengungkapkan bahwasannya *fraud* dapat terjadi disaat seorang mendapatkan penambahan kemampuan ekonomi ataupun kekayaan dari perbuatan kecurangan dan penipuan. Kecurangan yang dimaksud adalah kecurangan yang dengan sadar atau disengaja dilakukan. Arens, Elder, dan Beasley (2013) juga menjelaskan bahwa *fraud* adalah suatu tindakan kecurangan atas suatu kesadaraan atau yang dilakukan dengan secara sengaja dengan memiliki tujuan untuk mengambil hak atau kekayaan yang merugikan seseorang atau pihak lainnya. Dalam melakukan *fraud*, tindakan tersebut dapat diusahakan dari banyak pihak, baik dari kalangan internal perusahaan dan eksternal yang dapat dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Selaras dengan itu, Wells (2012) berpendapat bahwa *fraud* adalah suatu kecurangan dalam lingkup penyimpangan pada akuntansi yang memiliki tujuan untuk merugikan orang atau pihak lain. Motivasi yang dapat melatarbelakangi hal tersebut adalah dengan adanya keuntungan yang diperoleh dari pihak lain.

Indonesia adalah merupakan negara yang sangat kaya karena begitu banyak sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Sumber daya alam tersebut dapat menjadi satu modal penting dalam pembangunan negara dan upaya menaikkan tingkat kemakmuran masyarakatnya. Dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut, negara tentunya bergerak dengan cara mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN dan perusahaan swasta yang mengelola kekayaan sumber daya alam tersebut dituntut untuk melakukan pelaporan keuangan secara transparan bagi masyarakat. Laporan keuangan yang transparan sangat berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam mengambil keputusan, salah satunya

adalah orang yang melakukan investasi atau lebih dikenal dengan sebutan *investor*. Laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pemangku kepentingan ataupun *investor*, karena laporan keuangan adalah salah satu instrumen yang dapat memberikan informasi secara relevan terkait dengan kondisi riil perusahaan. Menurut Artaningrum (2017), pada saat kondisi penuh dengan ketidakpastian pada kinerja operasional ataupun kegiatan perusahaan, indikator utama yang dapat digunakan untuk mengenal serta mengetahui prospek secara rasional di masa atau periode yang akan datang adalah laporan keuangan.

Pertumbuhan pada pasar modal yang sangat berkembang begitu pesat, secara bersamaan persaingan dalam bisnis menjadi sangat panas karena meningkatnya tingkat kompetitif yang tinggi pada penyediaan dan perolehan data sebagai dasar dalam sikap mengambil keputusan. Salah satu data yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan adalah laporan keuangan yang disediakan oleh industri sebagai bentuk tanggungjawab pada entitas publik terhadap sumber daya yang dipakai oleh perusahaan dalam industri tersebut.

Pemangku kepentingan atau *stakeholders* tentu sangat membutuhkan laporan keuangan, karena didalam laporan keuangan berisikan informasi terkait kondisi perusahaan. Laporan keuangan juga memuat informasi terkait aktivitas perusahaan yang dapat memberikan sebuah indikasi-indikasi apabila kecurangan dilakukan di perusahaan. Sebagaimana di beritakan oleh salah satu media, yaitu Kabarpas (2015), media tersebut mengungkapkan bahwa terdapat kasus yang dilakukan oleh manajer *Credit Union*. Kasus tersebut merupakan kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh manajer, internal auditor beserta pengelolanya, imbas dari kejadian tersebut adalah ditutupnya perusahaan dan dihentikan fungsinya oleh para anggotanya. Selain ditutup oleh anggotanya, para pelaku terjangkit pada hukuman pidana penjara dan denda. Tidak hanya sampai situ, imbas dari kasus penggelapan dana juga mempengaruhi mitra kerja *Credit Union*. Mitra kerja *Credit Union* terutama yang berada diluar kota, merasa khawatir dan cemas mengenai insiden tersebut karena takut dikaitkan dalam kasus *Credit Union* dan memilih ingin mengganti nama. Hal tersebut menimbulkan pandangan yang buruk bagi pihak manajemen oleh masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan

dalam pengelolaan dana anggota adalah menjadi kekhawatiran yang sangat tinggi dan menyebabkan rasa tidak percaya serta amarah bagi anggotanya.

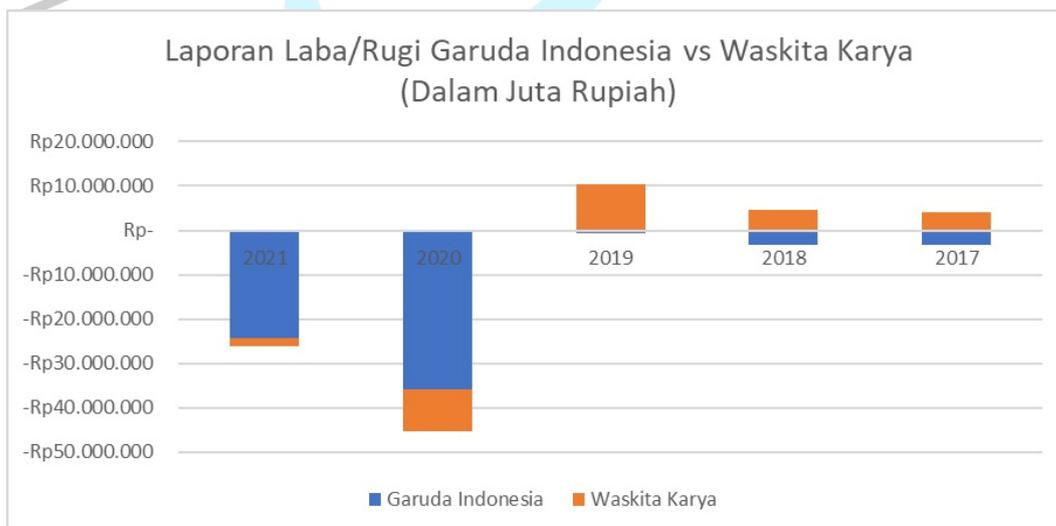
Ikatan Akuntan Indonesia (2012) mengungkapkan bahwa laporan keuangan dapat berguna untuk banyak kalangan yang memerlukannya sebagai dasar atau suatu pengambilan tindakan yang dapat berpengaruh pada kondisi ekonomi. Laporan keuangan juga bertujuan untuk menyediakan data terkait posisi keuangan, tingkat kinerja perusahaan dan arus kas dari perusahaan tersebut. Laporan keuangan juga harus dapat menampilkan sisi pertanggungjawaban pihak perusahaan pada tingkat manajerial atas pemanfaatan sumberdaya. Sebuah konsep yang didasari oleh *Statement of Financial Accounting Concept No.8, Financial Accounting Standard Board*.

Laporan keuangan yang baik yaitu laporan keuangan yang dapat memenuhi kriteria. Kerangka kerja konseptual berdasarkan SFAC No.8 untuk laporan keuangan, menjelaskan bahwa kerangka tersebut mencakup karakteristik kualitatif dan tujuan yang sebelumnya sudah terdapat atau dinyatakan pada SFAC No.1 dan SFAC No.2. Pelaporan keuangan memiliki tujuan yang tentunya tidak terbatas hanya pada isinya saja. Tujuan pelaporan keuangan juga terdapat pada media pelaporannya. Menurut Ghazali & Chariri (2014) Pelaporan keuangan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh FASB bahwa pelaporan keuangan juga mencakup media pelaporannya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan informasi yang terdapat pada sistem informasi akuntansi, antara lain informasi mengenai sumber-sumber ekonomi, kewajiban, laba periodik dan hal yang berkaitan lainnya. Dalam membuat laporan keuangan tentunya perusahaan menginginkan laporan keuangan yang dihasilkan menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut baik, dalam pengungkapan laporan keuangan tentunya tidak lepas dari resiko terjadinya kecurangan dimana seperti misalnya perusahaan sengaja mengubah atau memanipulasi data demi mewujudkan laporan keuangan yang baik.

Seperti halnya pada kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Amanah (2020), mengungkapkan bahwa PT Garuda Indonesia mencatatkan piutang dari PT Mahata Aero Teknologi kepada pos pencatatan pendapatan terkait pemasangan wifi

sedangkan belum dibayarkan oleh PT Mahata Aero Teknologi. Maka dari itu upaya dalam pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan adanya pengendalian internal dan *corporate governance*. Disamping itu, kesadaran individu perlu ditingkatkan agar tidak lagi terjadi kasus *fraud*.

Tuanakotta (2013) menjelaskan, perancangan pengendalian internal digunakan untuk diimplementasikan untuk mencegah adanya resiko-resiko yang mengancam suatu bisnis beserta dengan kecurangan-kecurangan yang dapat mengganggu entitas untuk mencapai tujuannya, salah satu contohnya adalah dengan adanya pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. Pengendalian internal diharapkan dapat menjadi pengendalian yang dapat diandalkan dalam mendeteksi kecurangan-kecurangan pihak tertentu atau mendeteksi adanya kegiatan yang mengancam perusahaan secepat mungkin sehingga dapat memberikan informasi bagi pihak manajemen untuk bertindak menanggulangi kecurangan tersebut. Menurut Aminus (2018) komponen yang terdapat pada pengendalian internal sudah termasuk proses serta cara yang akan diimplementasikan oleh perusahaan dengan memiliki tujuan untuk memberikan kepercayaan pada target perusahaan. Hal tersebut tentunya sangat dibutuhkan oleh berbagai instansi pemerintah, yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya kecurangan yang tentunya akan merugikan banyak kalangan.



Gambar 1.1 Data Fenomena

Dilansir MediaIndonesia.com (2020), mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 terungkap kasus korupsi pada perusahaan terbuka PT Waskita Karya yang terbukti telah melakukan proyek-proyek fiktif dari tahun 2009-2015 yang telah merugikan negara. Pengawasan yang kuat dibutuhkan pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan negara agar dapat terciptanya *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan tersebut. Selain pengawasan yang kuat pada penerapan *Good Corporate Governance*, dibutuhkan juga transparansi yang harus dilakukan oleh pihak internal perusahaan baik dalam jajaran direksi sampai dengan karyawan, sehingga kasus proyek fiktif yang dilakukan PT Waskita Karya yang menyebabkan kerugian sebesar Rp. 202 Milliar tidak terulang Kembali pada perusahaan BUMN lainnya.

Kasus lain seperti Dilansir jatim.bpk.go.id (2017) mengungkapkan bahwa terjadi kasus penyelewengan dana rutin tahun anggaran 2015 senilai Rp 2 miliar di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun, yang dilakukan oleh kepala Bappeda Kota Madiun dimana dalam kasus ini terungkap karena adanya proses penelitian analisa biaya pendidikan yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Ponorogo 2015. Penelitian itu merupakan program Bappeda dengan nilai Rp 90 juta. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang ketat serta tata kelola yang baik agar kasus ini tidak terulang kembali

Pengendalian internal adalah merupakan suatu susunan yang terstruktur mengenai pengawasan kegiatan dan perencanaan sebuah entitas yang berfungsi untuk mengawasi dan menyusun strategi apakah perusahaan sudah melakukan kegiatannya dalam ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kasus PT Waskita Karya dan Bappeda diatas tentunya sistem pengendalian internal sangat diperlukan bagi suatu organisasi, dengan adanya kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh PT Waskita Karya dan bappeda tidak berfungsi dengan baik atau bahkan memiliki kecenderungan terlibat pada kasus tersebut. Dengan diterapkan pengendalian internal yang baik maka seharusnya tidak terjadi kembali kasus proyek fiktif. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan pada perusahaan adalah dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan

atau jabatan, menurut Pope (2013) penyalahgunaan dalam memiliki suatu kekuasaan adalah merupakan suatu tindakan memanfaatkan kekuasaan atau jabatan tertentu untuk kepentingan pribadi. Selain penyalahgunaan kekuasaan, menurut Khanna (2015) terdapat faktor-faktor pada karyawan atau pegawai yang dapat menimbulkan terjadinya kecurangan pada suatu perusahaan, seperti, adanya sikap kompetitif sehingga menimbulkan persaingan pada karyawan, tingkat pelatihan yang minimal atau rendah dan banyaknya beban yang diberikan kepada karyawan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, seharusnya dapat memberikan pertanda bagi perusahaan terkait dampak yang akan muncul pada perusahaan, sehingga seharusnya pihak manajemen atau bahkan seluruh perusahaan dapat sadar dan menindak lanjuti potensi tersebut secara bersama dengan cara memperbaiki sistem yang sudah digunakan dalam organisasi dan bertujuan untuk menghindari resiko terjadinya potensi tersebut.

Dilansir dari Investopedia.com bahwa *Good Corporate Governance* didasari pada seperangkat aturan, keputusan, pengimplementasian dan alur pengendalian industri dengan cara melibatkan stakeholders seperti, investor, pihak manajemen, pihak konsumen, vendor, pemberi modal, negara, serta masyarakat. Pesatnya perkembangan bisnis, tentu perusahaan harus berusaha untuk bertahan menjaga kelangsungan bisnisnya. Hubungan antara *Good Corporate Governance* dengan pengendalian manajemen pada perusahaan sangatlah erat dalam upaya menjalankan perusahaan untuk bisa tetap bersaing dan berdiri dalam industri pada waktu yang lama. Untuk bisa tetap bersaing dan bertahan, perusahaan membutuhkan investor dan terus meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan. Salah satu cara meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan adalah dengan menerapkan *Good Corporate Governance* pada perusahaan. Dengan menerapkan *Good Corporate Governance* pada perusahaan, secara tidak langsung perusahaan dituntut untuk mengedepankan akuntabilitas, transparansi dan independensi sehingga investor atau pemilik modal pun percaya pada perusahaan.

Dalam menjaga kesamaan informasi dan meminimalisir adanya kepentingan individu dalam kegiatan perusahaan, dibutuhkan tata kelola perusahaan yang tepat dan benar sehingga menimbulkan keuntungan bagi bersama.

Sutedi (2014) mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah merupakan sebuah sistem pada perusahaan yang berfungsi untuk mengendalikan perusahaan dengan terikat pada peraturan yang diterapkan dan saling berkaitan dengan pihak internal dan eksternal atau dapat juga dikatakan bahwa perusahaan perlu untuk menghilangkan adanya ketimpangan pada setiap bagian dengan meningkatkan peraturan dan pengawasan. Pada hal yang demikian, perusahaan

diharapkan menjadi penghubung yang secara tidak langsung dilakukan melalui tata kelola pada perusahaan. Perusahaan juga harus bisa menjadi media perantara disaat munculnya sifat egois pada karyawan yang dapat menyebabkan munculnya kesempatan, motivasi serta perilaku pembenaran pada karyawan atau pihak tertentu. Pemahaman terkait hak dan kewajiban pada setiap bagian perlu dilakukan agar seluruh bagian mengerti posisinya pada perusahaan.

- Kurniawan & Izzati (2019) berpendapat bahwa pengendalian internal dapat memberikan pengaruh pada pencegahan *fraud* secara positif. Pada penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa apabila pengendalian internal diterapkan pada sebuah instansi, maka pengendalian internal tersebut dapat dengan baik mencegah terjadinya kecurangan atau *fraud*. Tidak hanya berfungsi untuk mencegah, akan tetapi pengendalian internal juga berfungsi untuk meminimalisir potensi terjadinya kecurangan. Penelitian tersebut didukung dengan hasil penelitian Nadia, Sukarmanto, dan Purnamasari (2018) yang memiliki hasil penelitian bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif dalam upaya pencegahan *fraud* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian pada BUMN menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak saja hanya berpengaruh pada pencegahan *fraud*, akan tetapi pengendalian internal juga dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan, yang dimana berarti apabila pengendalian internal pada suatu perusahaan itu baik maka tata kelola perusahaan tersebut akan ikut menjadi baik.

Menurut Soleman (2013) *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang positif pada pencegahan *fraud*. Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa dengan mengeliminasi atau meminimalisir faktor yang mendorong *fraud* terjadi dengan menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu akuntabilitas, transparansi dan integritas, maka *fraud* dapat di cegah. Hasil tersebut dapat

dibantahkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Raharjanti (2017) yang mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* hanya memiliki nilai Adjusted R Square sebesar 13,6% sehingga *Good Corporate Governance* tidak dapat berpengaruh pada *fraud*.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul dalam penelitian ini “Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk merumuskan masalah, yaitu:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* secara simultan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencegahan *Fraud*. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*
2. Mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud*
3. Mengetahui pengaruh pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* secara simultan terhadap pencegahan *fraud*

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru dan

pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencegahan *fraud*

2. Universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi studi bagi universitas mempelajari pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* dalam pencegahan *fraud*

3. Praktisi Industri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk dijadikan acuan dalam upaya pencegahan *fraud*

